

RESEARCH ARTICLE

Workshop Enterprise Architecture (EA) berbasis TOGAF dan SPBE di Diskominfo Jawa Barat

Dana Sulisty Kusumo,* Arfive Gandhi, Rosa Reska Riskiana, Agustinus David, Muthi'ah Az Zahra, Intan Nur Aini, Steven Gerald and Gede Agung Peramerta

Fakultas Informatika, Universitas Telkom, Bandung, 40257, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding author: rosareskaa@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

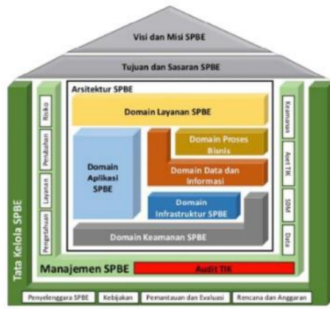
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut adanya perancangan *Enterprise Architecture* (EA) yang terintegrasi untuk memastikan keselarasan antara proses bisnis, layanan, aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi. Diskominfo Provinsi Jawa Barat sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam pengelolaan SPBE saat ini tengah menyusun EA secara menyeluruh. Dalam praktiknya, penyusunan EA di lingkungan Diskominfo Jawa Barat menghadapi dua tantangan utama, yaitu keterbatasan pemahaman sumber daya manusia terhadap konsep EA serta perlunya penguatan kapasitas internal agar implementasi EA tidak bergantung pada pihak eksternal. Menanggapi kebutuhan tersebut, Fakultas Informatika Universitas Telkom melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa *Workshop Enterprise Architecture* berbasis TOGAF yang dikontekstualisasikan dengan kerangka SPBE. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap konsep dasar EA, tahapan TOGAF ADM, serta keterkaitannya dengan domain-domain SPBE, khususnya dalam konteks perancangan proses bisnis dan layanan pemerintahan. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan praktik terarah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih terstruktur mengenai peran EA dalam mendukung implementasi SPBE serta pentingnya penyamaan persepsi lintas pemangku kepentingan. Selain itu, kegiatan ini mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan lanjutan, mekanisme pemantauan keselarasan proses bisnis dan sistem, serta penguatan kolaborasi antar unit. Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung implementasi SPBE yang lebih terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Key words: *Enterprise Architecture*, SPBE, TOGAF

Pendahuluan

Transformasi digital di sektor pemerintahan merupakan salah satu agenda strategis nasional yang diwujudkan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tertera di Peraturan Presiden Nomor 95/2018 [1]. Peraturan ini mengatur strategi serta tata kelola yang diperlukan oleh instansi pemerintah dalam menerapkan *Government Enterprise Architecture* (GEA). Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Tamansari No. 55 memiliki tugas utama melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, yang mencakup pengelolaan *e-Government*, pengembangan aplikasi, penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik, penguatan persandian dan keamanan informasi, serta pengelolaan statistik. Selain itu, Diskominfo Jabar berperan dalam perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program di bidang terkait, serta menjalankan fungsi administratif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong transformasi digital di tingkat provinsi. Dengan cakupan

tugas yang begitu luas, peran Diskominfo Jabar menjadi sentral dalam mendorong transformasi digital di lingkup pemerintahan provinsi. Saat ini, Diskominfo Jawa Barat sedang berada dalam tahapan penyusunan *Enterprise Architecture* (EA) secara menyeluruh. Proses tersebut telah mencakup analisis kondisi saat ini (*as-is*), identifikasi isu strategis, serta penyusunan rancangan kondisi target (*to-be*). Secara jangka panjang, inisiatif ini ditujukan untuk mewujudkan EA yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah. Dalam kerangka SPBE, arsitektur pemerintahan Provinsi Jawa Barat disusun dengan mengacu pada enam domain utama sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan nasional, yaitu domain proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, keamanan, serta layanan (Gambar 1) [2].



Gambar 1. Tata Kelola SPBE

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak Diskominfo Jabar, pengelolaan proses bisnis berada dalam lingkup Biro Organisasi Sekretariat Daerah, sedangkan pengelolaan teknologi informasi beserta keamanan infrastruktur menjadi tanggung jawab Diskominfo Jabar. Sebagai bagian dari implementasi tata kelola data, Diskominfo Jawa Barat telah mengembangkan Portal Data Jawa Barat yang menyediakan tiga layanan utama, yaitu Satu Data, Open Data, dan Satu Peta. Pengembangan portal ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Satu Data Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia [3]. Portal tersebut berfungsi sebagai media integrasi data dari berbagai perangkat daerah, yang selanjutnya melalui proses validasi oleh Tim Jawara Data sebelum didistribusikan sesuai dengan hak akses, baik untuk kepentingan publik maupun kebutuhan internal. Inisiatif ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam membangun tata kelola data yang lebih terstruktur dan terkoordinasi. Dalam praktiknya, penyusunan EA di lingkungan Diskominfo Jabar menghadapi sejumlah tantangan.

Pertama, latar belakang sumber daya manusia yang terlibat belum seluruhnya memiliki keahlian mendalam mengenai EA. Hal ini menimbulkan kesulitan mendasar, misalnya dalam mendefinisikan proses bisnis yang baku, mengidentifikasi ruang lingkup layanan, hingga membedakan antara layanan publik dan *outcome* dari proses bisnis. Perdebatan-perdebatan konseptual semacam ini seringkali menjadi penghambat dan menunda penyusunan dokumen EA yang komprehensif [4]. Kedua, meskipun terdapat dukungan dari pihak ketiga (vendor atau konsultan), keberlanjutan implementasi EA tidak dapat sepenuhnya bergantung pada eksternal. Pihak internal—dalam hal ini Diskominfo Jabar—yang menjalankan tugas sehari-hari dan memahami kebutuhan teknis organisasi, justru perlu memiliki kapasitas lebih kuat agar EA yang disusun tidak hanya berhenti pada tataran dokumen, melainkan benar-benar terimplementasi dalam kebijakan dan praktik kerja.

Dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh Diskominfo, pemahaman yang memadai terhadap konsep EA menjadi aspek penting dalam mengurangi kendala dan permasalahan yang muncul, khususnya yang berkaitan dengan kapabilitas sumber daya serta tingkat pemahaman dalam penerapan konsep EA. Oleh karena itu, pemberian pelatihan terkait EA menjadi langkah yang relevan dan strategis. Berdasarkan perbandingan berbagai *framework* EA, TOGAF (*The Open Group Architecture Framework*) dinilai memiliki karakteristik yang lebih komprehensif dan detail dibandingkan *framework* EA lainnya. TOGAF menyediakan tahapan yang sistematis serta artefak yang jelas, sehingga relatif mudah diadaptasi dalam lingkungan organisasi pemerintahan yang kompleks [5]. Sejumlah penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa TOGAF telah digunakan sebagai acuan dalam perancangan EA pada sektor publik [6], [7], [8]. Secara global, TOGAF juga banyak digunakan sebagai referensi dalam implementasi GEA di

berbagai negara [4], menunjukkan relevansi dan fleksibilitas *framework* ini dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis arsitektur. TOGAF mencakup empat domain utama, yaitu *business architecture*, *data architecture*, *application architecture*, dan *technology architecture* [9], yang secara konseptual selaras dengan domain-domain arsitektur SPBE sebagaimana ditunjukkan pada Gambar X. Sejumlah studi implementasi juga menunjukkan bahwa pemanfaatan TOGAF dan SPBE secara terpadu dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Integrasi kedua kerangka kerja tersebut terbukti mampu meningkatkan kinerja organisasi serta efisiensi operasional dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik [10]. Berdasarkan karakteristik tersebut, TOGAF dipandang sebagai kerangka kerja yang tepat untuk digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Melalui *workshop* berbasis TOGAF dan SPBE ini, diharapkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih terstruktur mengenai konsep EA, sekaligus mampu mengaitkan prinsip-prinsip TOGAF dengan kebutuhan implementasi SPBE di lingkungan Diskominfo Jawa Barat. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas internal organisasi dalam menyusun dan mengimplementasikan EA secara berkelanjutan.

Metodologi

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan dengan Diskominfo sebagai mitra, hingga evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan dengan Diskominfo sebagai mitra, hingga evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan Kegiatan

Koordinasi Awal dengan Diskominfo Jabar

Koordinasi awal dengan Diskominfo, untuk menyesuaikan materi *workshop* sesuai kebutuhan peserta. Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan di kantor Diskominfo Provinsi Jawa Barat, dengan peserta yang terdiri atas pegawai Diskominfo yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan SPBE.

Pembuatan Materi

Materi ini disusun berdasarkan praktik terbaik dalam pengembangan arsitektur *enterprise* yang dapat diterapkan di lingkungan pemerintah daerah, serta akan menyesuaikan kebutuhan dan prioritas yang dimiliki oleh Diskominfo. Deskripsi singkat pada setiap poin materi yang akan disampaikan dalam pendampingan adalah sebagai berikut:

- **Pengenalan Arsitektur SPBE dan TOGAF**
Pemahaman mengenai kebijakan nasional terkait enam domain SPBE serta prinsip-prinsip dasar TOGAF. Materi ini mencakup hubungan antara kebijakan SPBE dengan praktik internasional dalam manajemen arsitektur *enterprise*.



Gambar 3. TOGAF-ADM

- Pendekatan TOGAF-ADM (Architecture Development Method)
Penjelasan singkat mengenai tahapan dalam TOGAFADM pada Gambar 3, mulai dari *Preliminary Phase* hingga *Architecture Change Management*, dan bagaimana setiap fase dapat diadaptasi untuk mendukung tata kelola SPBE di Jawa Barat.
- Praktik Penyusunan *Enterprise Architecture*
Peserta akan dibimbing dalam memahami serta mempraktikkan bagaimana menyusun arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi (Fase B, C, dan D pada TOGAF-ADM) yang selaras dengan kebutuhan SPBE. Kegiatan ini bersifat praktis sehingga peserta dapat langsung menghubungkan konsep dengan kondisi nyata di lingkungan Diskominfo.

Pelaksanaan Workshop

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang dalam bentuk *workshop* pendampingan dengan dua agenda utama, yaitu:

- Penyampaian materi dan diskusi interaktif
Tim dosen akan menyampaikan materi mengenai Arsitektur SPBE berbasis TOGAF, yang mencakup pengenalan konsep dasar dan penjelasan tahapan ADM. Sesi ini dilaksanakan secara interaktif sehingga peserta dapat berdiskusi, menyampaikan pertanyaan, serta mengaitkan isi materi dengan kebutuhan nyata di lingkungan Diskominfo.
- Praktik penyusunan arsitektur dengan pendampingan asisten
Setelah sesi materi, peserta akan melakukan praktik langsung terkait penyusunan arsitektur pada fase B, C, dan D sesuai tahapan ADM. Dalam kegiatan ini, peserta didampingi oleh dosen dan asisten agar proses praktik berjalan terarah dan memberikan pengalaman aplikatif yang relevan.

Evaluasi

Evaluasi kegiatan, berupa pengumpulan umpan balik peserta untuk menilai efektivitas kegiatan serta menjajaki kemungkinan tindak lanjut pendampingan atau kerjasama berikutnya.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat pada tanggal 6–7 November 2025, dengan melibatkan pegawai Diskominfo yang berperan dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pelaksanaan

hari pertama dilakukan secara daring melalui *platform Zoom Meeting* dan diikuti oleh 22 peserta. Kegiatan pada hari pertama difokuskan pada penyampaian tiga topik utama, yaitu pengenalan TOGAF *Architecture Development Method* (ADM) yang dapat dilihat pada Gambar 4, pembahasan TOGAF fase B hingga D, serta penerapan *Enterprise Architecture* dalam konteks SPBE dengan penekanan pada domain proses bisnis.



Gambar 4. Foto Pelaksanaan Hari Pertama

Diskominfo Jabar dan diikuti oleh 18 orang. Sifat pelaksanaan hari ke dua adalah praktik terarah mengenai perancangan EA dari merancang arsitektur bisnis, arsitektur Sistem Informasi, dan Arsitektur Teknologi (Fase B-D pada TOGAF) yang dipandu langsung oleh dosen dan juga asisiten-asisten pelatihan (Gambar ??).



Gambar 5. Foto Pelaksanaan Hari Kedua (Sesi Praktik)

Pada setiap akhir sesi, diselenggarakan diskusi interaktif dengan para peserta guna menggali berbagai isu strategis dan operasional yang dihadapi, sekaligus sebagai bahan refleksi untuk pengembangan kegiatan ke depan. Setelah seluruh rangkaian sesi pelatihan selesai, peserta juga diminta untuk mengisi kuesioner yang bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan serta menjajaki potensi keberlanjutan dalam bentuk penelitian maupun kegiatan pengabdian masyarakat lanjutan.

Tantangan dan Rekomendasi

Berdasarkan sesi diskusi dan tanya jawab dalam kegiatan pengabdian masyarakat, teridentifikasi sejumlah isu strategis dan operasional yang berkaitan dengan perencanaan serta implementasi *Enterprise Architecture* (EA) dan SPBE di lingkungan pemerintahan daerah.

- Keterbatasan Sumber Daya Penyusunan proses bisnis kondisi eksisting (*as-is*) belum didukung oleh pengelolaan yang memadai, seperti ketiadaan tim khusus serta belum jelasnya prioritas dan tenggat waktu. Kondisi tersebut berdampak pada belum terintegrasinya proses bisnis antar unit secara optimal, sehingga implementasi EA yang berjalan masih bersifat parsial. Trimanadi dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perancangan EA pada

instansi pemerintahan di Indonesia memang masih didominasi oleh kendala keterbatasan sumber daya, meliputi waktu, anggaran, dan kapabilitas sumber daya manusianya itu sendiri [4]. Berbagai hambatan yang muncul kerap berkaitan dengan kurangnya kompetensi dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola EA secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, peningkatan kualifikasi dan kapasitas aparatur pemerintah dalam pemanfaatan EA menjadi aspek yang sangat krusial [11]. Penyelenggaraan pelatihan terhadap *framework* EA yang telah mapan, seperti TOGAF, Zachman *Framework*, dan FEAF, dipandang penting untuk memperkuat pemahaman serta keterampilan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kerangka kerja SPBE. Lebih lanjut, Trimnadi menekankan perlunya perhatian serius terhadap komitmen manajemen, kualitas sumber daya manusia, kolaborasi lintas organisasi, serta kapabilitas pengelolaan relasi antar pemangku kepentingan guna mendukung keberhasilan implementasi EA secara berkelanjutan [4].

- Kejelasan Peran Stakeholder

Dalam perancangan *Enterprise Architecture* (EA) pada konteks SPBE, kejelasan peran dan keterlibatan para pemangku kepentingan menjadi aspek yang krusial. Keterlibatan masyarakat, misalnya, perlu diawali dengan pendefinisian yang jelas mengenai siapa yang dimaksud sebagai “masyarakat” dalam konteks layanan yang dirancang. Bagi Diskominfo, masyarakat tidak selalu merujuk pada warga secara langsung, tetapi juga mencakup pemangku kepentingan lain, seperti pemerintah kabupaten/kota maupun perangkat daerah yang berperan sebagai pengguna layanan dan aplikasi yang dikembangkan. Pemahaman ini selaras dengan pengelompokan layanan publik berbasis kapabilitas elektronik (*e-capability*), yang umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu *Government to Citizen* (G2C), *Government to Business* (G2B), dan *Government to Government* (G2G) [12]. Tantangan berikutnya berkaitan dengan upaya penyeragaman proses bisnis lintas perangkat daerah, yang menuntut kejelasan pendekatan perancangan, apakah ditempuh melalui mekanisme *bottom-up* yang berangkat dari praktik di masing-masing unit kerja, atau melalui pendekatan *top-down* yang ditetapkan melalui kebijakan serta standar di tingkat pusat. Dalam konteks pemerintahan, peran pimpinan yang memiliki pemahaman terhadap konsep *Government Enterprise Architecture* (GEA) menjadi sangat menentukan keberhasilan implementasinya. Oleh karena itu, pendekatan *top-down* dengan penetapan tujuan strategis yang jelas dipandang lebih efektif, sehingga setiap unit kerja dapat memetakan tujuan organisasi ke dalam sasaran dan proses bisnis masing-masing secara selaras.

- Perbedaan Konseptual antara Proses Bisnis dan Layanan

Penggunaan terminologi proses bisnis dan layanan belum sepenuhnya selaras secara konseptual. Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan pemaknaan di antara para pelaksana SPBE dalam membangun arsitektur pada domain tersebut. Secara konseptual, *business domain* merepresentasikan area operasional spesifik suatu organisasi dengan karakteristik yang unik, sedangkan *business process domain* berfokus pada alur kerja organisasi serta pengaturan perilaku jaringan pemerintahan. Adapun *service domain* merujuk pada layanan yang disediakan secara elektronik dan terintegrasi. Dalam regulasi SPBE di Indonesia, *business process domain* didefinisikan sebagai kumpulan aktivitas terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat maupun pemerintah daerah. Namun demikian, pemahaman yang berkembang di lapangan menunjukkan bahwa domain proses bisnis dalam konteks SPBE seringkali lebih dekat dengan pengertian *business domain*. Sebagian besar peneliti memandang *service domain* sebagai representasi dari ruang lingkup dan jenis layanan

yang diberikan kepada pengguna [13][14]. Dalam konteks *Enterprise Architecture*, domain ini berfokus pada layanan yang disediakan oleh organisasi, khususnya layanan yang disampaikan secara elektronik [15] dan terintegrasi, baik kepada masyarakat, pelaku usaha, maupun antarinstansi pemerintahan [16]. Dengan demikian, *service domain* lebih menekankan pada perspektif pengguna dan nilai layanan yang diterima, dibandingkan dengan aktivitas internal organisasi yang diatur dalam domain proses bisnis. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya penyalarsan terminologi proses bisnis dan layanan secara lintas pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, konsultan, dan mitra bisnis [4]. Penyamaan persepsi ini menjadi penting guna memastikan konsistensi dalam perancangan *Enterprise Architecture* dan mendukung kelancaran implementasi SPBE. Kesamaan persepsi ini juga berperan dalam menyederhanakan dan memperkuat implementasi EA secara menyeluruh, sekaligus meminimalkan bias konseptual dalam penerapannya.

- Dinamika Regulasi

Penyusunan roadmap belum sepenuhnya mampu mencakup seluruh urusan pemerintahan secara komprehensif dan berkelanjutan. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik penyusunan proses bisnis SPBE yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak dan unit kerja dengan peran serta kewenangan yang beragam. Proses kolaboratif ini menjadikan perumusan proses bisnis sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan, di mana perubahan regulasi atau arahan strategis seringkali memicu penyesuaian proses bisnis, baik pada tahap pengembangan sistem maupun setelah sistem diimplementasikan. Dalam hal ini dokumen roadmap dan arsitektur harus dipahami sebagai artefak yang dinamis dan berpotensi mengalami perubahan seiring adanya kebijakan baru maupun kebutuhan organisasi. Dinamika yang tidak dapat dihindari tersebut berdampak langsung pada konsistensi layanan yang diberikan kepada masyarakat, karena perubahan proses bisnis yang tidak selalu diikuti dengan sinkronisasi lintas instansi dapat menimbulkan ketidaksesuaian alur layanan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kondisi ini pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas sistem dan layanan publik yang dihasilkan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan mekanisme verifikasi dan pemutakhiran yang dilakukan secara berkala, baik melalui penyesuaian roadmap maupun penguatan dukungan regulasi, guna menjaga keselarasan antara proses bisnis, layanan, dan aplikasi. Upaya tersebut perlu disertai dengan pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta, sepanjang tahapan perencanaan dan implementasi. Ketiadaan roadmap yang jelas juga menegaskan pentingnya perencanaan strategis jangka panjang yang didukung oleh fleksibilitas dalam pelaksanaan, sehingga transformasi SPBE dapat berjalan berdasarkan visi yang kuat dan rencana yang terstruktur serta adaptif terhadap pembauran berkelanjutan [11]. Selain itu, temuan ini membuka implikasi bagi kajian lanjutan, khususnya terkait strategi untuk memastikan kolaborasi yang efektif antar pemangku kepentingan internal pemerintah guna menghindari silo *mentality*, sekaligus memperkuat peran pemangku kepentingan eksternal dalam mendukung terwujudnya solusi *e-government* yang inklusif dan mudah diakses [17].

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada peserta setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Kuesioner ini diisi oleh total 9 orang peserta yang mengikuti kegiatan pada hari pertama dan hari kedua. Instrumen evaluasi digunakan untuk

memperoleh umpan balik terkait pelaksanaan kegiatan, meliputi kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta, kejelasan penyampaian, manfaat yang dirasakan, serta potensi keberlanjutan kegiatan dalam bentuk penelitian atau pengabdian lanjutan. Hasil kuesioner selanjutnya dianalisis sebagai bahan refleksi dan dasar perbaikan kegiatan serupa di masa mendatang.

Table 1. Kuesioner Evaluasi Pengabdian Masyarakat

| Pertanyaan | Rata-rata |
|--|--|
| Materi kegiatan sesuai dengan kebutuhan mitra/peserta | 4.67 |
| Waktu pelaksanaan kegiatan ini relatif sesuai dan cukup | 3.78 |
| Materi/kegiatan yang disajikan jelas dan mudah dipahami | 4.78 |
| Panitia memberikan pelayanan yang baik selama kegiatan | 5.00 |
| Peserta menerima dan berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dilanjutkan di masa yang akan datang | 5.00 |
| Skala | Rentang skala 1–5 (Sangat Tidak Setuju – Sangat Setuju) |

Dari hasil evaluasi pada Tabel 1, terlihat bahwa waktu pelaksanaan dinilai kurang memadai, dengan total rata-rata skor 3.78. Beberapa peserta memberikan masukan agar durasinya diperpanjang sehingga materi dapat dibahas lebih mendalam, terutama terkait praktik *case study* yang disusun langsung dari awal. Keterbatasan waktu ini dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan di lapangan. Pada hari kedua, pola partisipasi peserta menjadi kurang optimal karena sebagian peserta harus meninggalkan ruangan secara bergantian untuk menghadiri agenda kedinasan lain yang berlangsung pada waktu bersamaan. Situasi ini dapat dipahami mengingat pegawai Diskominfo memiliki tanggung jawab operasional harian yang tidak dapat ditinggalkan. Kondisi tersebut menyebabkan sesi praktik tidak dapat diikuti secara penuh oleh seluruh peserta, sehingga pencapaian tujuan pembelajaran pada hari kedua belum maksimal. Secara keseluruhan, evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini berdampak pada peningkatan pemahaman dan kesadaran mitra terhadap pentingnya *Enterprise Architecture* sebagai fondasi perencanaan dan implementasi SPBE. Selain itu, pihak Diskominfo juga menyampaikan harapan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali sebagai upaya untuk lebih mendukung percepatan dan penguatan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Arah Penelitian/Abdimas Lanjutan

Mengacu pada hasil evaluasi kegiatan dan temuan selama pelaksanaan pengabdian masyarakat, dapat diidentifikasi beberapa arah pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat lanjutan yang strategis untuk mendukung implementasi SPBE.

1. Penguatan Kapabilitas SDM melalui Pelatihan *Enterprise Architecture* Berkelanjutan: Kegiatan lanjutan perlu diarahkan pada penyelenggaraan pelatihan *Enterprise Architecture* (EA) yang lebih

mendalam dan berkelanjutan bagi aparat pemerintah. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan praktis terkait EA dan SPBE, khususnya dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan kompleksitas koordinasi lintas unit. Penggunaan *framework* yang terstruktur dan telah mapan, seperti TOGAF, dapat menjadi acuan untuk membantu peserta memahami tahapan perancangan EA secara sistematis dan aplikatif.

2. Pengembangan Mekanisme Pemantauan Kesesuaian Proses Bisnis dan Implementasi Sistem: Arah penelitian dan pengabdian berikutnya dapat difokuskan pada perancangan mekanisme atau pendekatan untuk memantau keterkaitan antara proses bisnis dan implementasi sistem SPBE. Mekanisme ini diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan proses bisnis—baik akibat dinamika kebijakan maupun kebutuhan organisasi—dapat terpetakan dan tersinkronisasi dengan sistem yang dikembangkan. Mengingat proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, aspek kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi elemen kunci dalam pengembangan mekanisme tersebut.
3. Penyelarasan Terminologi dan Pemahaman Domain dalam Implementasi SPBE: Diperlukan upaya lanjutan untuk menyelaraskan pemahaman dan penggunaan terminologi, khususnya terkait domain proses bisnis dan layanan dalam konteks SPBE. Penyamaan persepsi ini penting untuk meminimalkan perbedaan interpretasi antar pemangku kepentingan yang dapat memengaruhi konsistensi perancangan EA. Penelitian maupun kegiatan abdimas dapat diarahkan pada penyusunan panduan konseptual atau *best practice* yang mendukung keselarasan terminologi dan pemahaman lintas organisasi.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa *Workshop Enterprise Architecture* berbasis TOGAF dalam konteks SPBE di lingkungan Diskominfo Provinsi Jawa Barat memberikan gambaran mengenai tantangan utama dalam perancangan dan implementasi EA di sektor pemerintahan. Temuan menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya, belum optimalnya penyusunan roadmap jangka panjang, dinamika regulasi akibat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta perlunya penyamaan terminologi antara proses bisnis dan layanan. Kegiatan ini memperoleh respons positif dan menunjukkan kebutuhan akan pelatihan lanjutan. Hasil kegiatan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas melalui pelatihan EA berbasis *framework* terstruktur seperti TOGAF, serta pengembangan mekanisme pemantauan keselarasan proses bisnis dan sistem guna mendukung implementasi SPBE yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pemahaman praktis peserta, tetapi juga membuka peluang bagi penelitian dan pengabdian masyarakat selanjutnya yang mendukung penguatan implementasi SPBE secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018;. Accessed: 2025-12-14. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/kep.359-diskominfo/2023 tentang Arsitektur SPBE Provinsi Jawa Barat 2023–2028;. Accessed: 2025-12-14. <https://jdih.jabarprov.go.id/>.
3. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019;. Accessed: 2025-12-14. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>.

4. Trimanadi R, Sensuse DI. Understanding Government Enterprise Architecture: A Review and Case Study. *IEEE Access*. 2025;13:90088-108.
5. Fahlevi AH, Nugraha RA, Falahah, S AM. Enterprise Architecture Design on Data and Application Domain Using TOGAF Framework. In: *International Conference on Digital Business and Technology Management (ICONDBTM)*; 2023. p. 1-7.
6. Wulandari D, Gumilang SFS, Mulyana R. Perancangan Enterprise Architecture Layanan SPBE di Lingkungan Pemkab Sukabumi. *JURTEKSI*. 2021;8(1):19-26.
7. Ningtyas KT, Gumilang SFS, Hanafi R. Perancangan Arsitektur SPBE pada Urusan Sosial di Provinsi Jawa Barat. *JIPi*. 2023;8(2):355-69.
8. Khaerunisa A, Gumilang SFS. Perancangan Arsitektur SPBE Bidang Transportasi Berbasis TOGAF ADM. *Syntax Literate*. 2022;7(9):14718-36.
9. The Open Group. The TOGAF Standard;. Accessed: 2025-12-14. <https://www.opengroup.org/togaf>.
10. Hadjarati PRYP, Widodo AM, Tjahjono B. Comparative Analysis of Enterprise Architecture Frameworks Using TOGAF ADM and SPBE. *Eduvest*. 2025;5(3):2766-73.
11. Afarini N, Hindarto D. The Proposed Implementation of Enterprise Architecture in E-Government. *IJSECS*. 2023;3(3):219-29.
12. Mahendra DKWW, Sulisty S, Putra GD. Enterprise Architecture in E-Government Application: A Systematic Literature Review. In: *International Electronics Symposium (IES)*; 2024. p. 353-8.
13. Rahmani A, Behbahaninia PS, Parsaei M, Mahmoudkhani M. Public Sector Financial Management Maturity Model. *International Review of Administrative Sciences*. 2024;90(3):581-98.
14. Lnenicka M, Komarkova J. Developing Government Enterprise Architecture Framework. *International Journal of Information Management*. 2019;46:124-41.
15. Spagnoletti P, Resca A, Lee G. A Design Theory for Digital Platforms Supporting Online Communities. *Journal of Information Technology*. 2015;30(4):364-80.
16. Sasa A, Krisper M. Enterprise Architecture Patterns for Business Process Support Analysis. *Journal of Systems and Software*. 2011;84(9):1480-506.
17. Abdurahman S. Exploring the Challenges and Implications of E-Government Services; 2022. Accessed: 2025-12-15. <http://hdl.handle.net/11427/36997>.